

# ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

## *Performance Analysis of the Realization of the revenue and Expenditure Budget of the Enrekang District Government*

MURDIONO

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Makassar  
E-mail: [murdiono159@gmail.com](mailto:murdiono159@gmail.com)

### **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten Enrekang tahun 2018 - 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 – 2020 dilihat dari 1). Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata persentase berada pada kriteria rendah sekali yaitu 7,9%. 2). Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kriteria sangat kurang yaitu 6,83%. 3). Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah rata-rata presentase berada pada kriteria Tinggi yaitu 89,65%. 4). Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata presentase berada pada kriteria Tidak Efektif yaitu 57%. 5). Rasio Efisiensi keuangan daerah rata-rata presentase berada pada kriteria Efisien yaitu 99,36%. 6). Rasio pertumbuhan keuangan daerah rata-rata presentse berada pada kriteria sangat baik yang berada pada angka presentase positif yang artinya sangat baik.

**Kata kunci: Kinerja, Realisasi APBD, Rasio Keuangan**

### **SUMMARY**

This study aims to determine the performance of the regional government revenue and expenditure budget of Enrekang Regency in 2018 - 2020. This research is a quantitative descriptive study. This research was carried out at the Regional Financial Management Agency of Enrekang Regency. The data collection technique used is documentation. The data analysis technique used is descriptive quantitative using several financial ratios, namely, the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of regional financial effectiveness, the ratio of regional financial efficiency, and the ratio of regional financial growth.

The results of the analysis show that the performance of the local government of Enrekang Regency in 2018 - 2020 is seen from 1). The average regional financial independence ratio is in the very low criteria of 7.9%. 2). The Fiscal Decentralization Degree Ratio is in the very poor criteria, namely 6.83%. 3). The average regional financial dependence ratio is in the High criteria, namely 89.65%. 4). Effectiveness Ratio of Regional Original Revenue the average percentage is in the Ineffective criteria, namely 57%. 5). The average regional financial efficiency ratio is in the Efficient criteria, namely 99.36%. 6). The average regional financial growth ratio is in the very good criteria which is at a positive percentage number which means very good.

**Keywords: Performance, APBD Realization, Financial Ratio**

## A. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang suatu daerah karena salah satu faktor pendorong kualitas sumber daya daerah itu sendiri tergantung dari pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 239). Salah satu tugas BPKD adalah menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari BPKD dapat diperoleh laporan keuangan pemerintah daerah baik target maupun realisasi APBD sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan. Suatu pengukuran kinerja yang didasarkan atas karakteristik operasional ini bermanfaat untuk mengkuantifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan (Mahsun, 2013:30). Perhatian terhadap pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja organisasi sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik.

Salah satu alat yang dipakai untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio ini digunakan untuk tolak ukur dalam

menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi sumber pendapatan dalam pembentukan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

BPKD merupakan salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang di bentuk berdasarkan peraturan daerah yang pembentukan melalui peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis beralamat di JL. Jendral Sudirman, Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Dimensi keuangan daerah yang paling krusial yang akan diteliti adalah kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, dan ketergantungan keuangan daerah kabupaten Enrekang. Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan sebagai keberhasilan Pemerintah kabupaten Enrekang merealisasikan pendapatan asli daerah yang dianggarkan dan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017

		NGGARAN (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		
Pendapatan Pajak Daerah		933.965.000.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah		30.165.130.944,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan		12.600.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah		83.421.960.638,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>136.152.091.582,00</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>		
<b>Transfer pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>		
Dana Bagi Hasil Pajak		17.628.988.184,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		6.440.104.421,00
Dana Alokasi Umum		534.335.959.000,00

Dana Alokasi Khusus	229.688.040.000,00	229.688.040.000,00	tersebut
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	788.093.091.605,00	765.016.962.563,00	terdiri dari 77.024.586,900 dan yang telah direncanakan.
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>			Anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	
Dana Penyesuaian	89.128.443.000,00	89.128.443.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya	89.128.443.000,00	89.128.443.000,00	
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>			Mahsun (2013:131-132) mengemukakan beberapa pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik sebagai berikut:
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.874.681.408,00	36.068.762.539,00	1) Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dan realisasinya. Hasil yang selisih lebih ( <i>favourable variance</i> ) atau selisih kurang ( <i>unfavourable variance</i> ).
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.134.490.600,00	13.907.912.000,00	
Pendapatan Bantuan Keuangan	0,00	0,00	
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	38.009.172.008,00	40.066.674.539,00	
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>915.230.706.613,00</b>	<b>894.212.079.102,00</b>	
<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>			2) Analisis rasio laporan keuangan merupakan pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar
Pendapatan Hibah	6.336.630.000,00	6.527.246.258,00	3) <i>Balanced scorecard method</i> merupakan pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan nonfinansial. Dimensi pengukuran mencakup 4 (empat) perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan ( <i>user</i> ), perspektif proses bisnis internal dan perspektif inovasi-pembelajaran.
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	4) <i>Performace audit</i> (Pengukuran <i>value for money</i> ) merupakan pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>	<b>6.336.630.000,00</b>	<b>6.527.246.258,00</b>	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.057.719.428.195,00</b>	<b>1.000.408.602.312,30</b>	

Sumber: APBD Kab. Enrekang 2017

Tabel 1 terlihat bahwa realisasi anggaran kabupaten Enrekang pada tahun 2017 yang bervariasi. Rata-rata realisasi pendapatan pemerintah kabupaten Enrekang tidak melebihi dari anggaran. Pada tahun 2017 jumlah pendapatan Kabupaten Enrekang dianggarkan sebesar Rp 1.057.719.428.195,00, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 1.000.408.602.312,30 sehingga dapat dikatakan bahwa yang terealisasi belum sesuai dengan anggaran yang seharusnya. Hal ini yang menjadi landasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang .

## B. KAJIAN TEORI

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran. Analisis tersebut akan menunjukkan seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara meneliti setiap elemen, membandingkan nilai elemen tertentu dengan elemen lainnya untuk menghasilkan angka rasio keuangan, serta memprediksi kondisi di masa mendatang. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi : Mahmudi (2016).

- 1) Neraca
- 2) Laporan Operasional (LO)

- 3) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4) Laporan Arus Kas (LAK)
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- 8) Lampiran: Laporan Keuangan BUMD

Dari laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah, salah satu yang menarik untuk dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada laporan realisasi anggaran, perlu diketahui elemen pada laporan realisasi anggaran. Menurut Mahsun (2016:73) “ laporan realisasi anggaran terdiri atas enam elemen (pos) utama, yaitu: 1) pendapatan, 2) belanja, 3) transfer, 4) surplus/defisit, 5) pembiayaan, 6) SilPA (SIKPA).”

Mengingat pentingnya manajemen pendapatan dan analisis pendapatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah, maka fokus penelitian ini adalah analisis pendapatan laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan beberapa analisis pendapatan untuk mengukur Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah daerah.

Mahmudi (2016:134-135) analisis pendapatan pada laporan realisasi anggaran dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- 1) Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan
- 2) Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah
- 3) Menghitung rasio keuangan
- 4) Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan

Dari analisis di atas, pada penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan. Dari beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di atas, peneliti hanya menggunakan beberapa analisis rasio keuangan antara lain:

### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan keuntungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Menurut Halim (2007: 232) Rasio kemandirian dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Pendapatan asli daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

**Tabel 2 pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah**

Kemandirian daerah	Kemandirian 100%	Pola hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007: 169)

### 2) Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Menurut Mahmudi (2016:140) “Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.” Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3 Kategori Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

### 3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Mahmudi (2016:140) “Rasio

ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.” Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

**Tabel 4 Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Interval
Rendah sekali/Baik	≤50% - 62,5%
Rendah	62,6% - 75%
Sedang	75,1% - 87,5%
Tinggi	87,6% - 100%

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

### 4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahsun (2013:182) “Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.” Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan dalam memperoleh pendapatan asli daerah dikategorikan efektif apabila rasio ini minimal mencapai 1 atau 100%. Rasio Efektivitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Mahmudi (2010:141) mengemukakan secara umum nilai efektivitas pendapatan asli daerah dapat dikategorikan seperti pada tabel 5.

**Tabel 5 Kategori Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Kemampuan
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%

Kurang Efektif

75% - 89%

Tidak Efektif

<75%

Sumber: Mahmudi (2016: 141) diolah

### 5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan rasio efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Blanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria rasio efisiensi keuangan daerah, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

**Tabel 6 Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase	Kriteria
X<100%	Efisien
X>100%	Tidak Efisien
X=100%	Efisien Berimbang

Sumber: Mahsun (2009:187)

### 6) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007: 241) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari suatu periode ke periode lainnya. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } t - \text{Realisasi Pendapatan } t-1}{\text{Realisasi Pendapatan } t-1}$$

Adapun kriteria rasio pertumbuhan, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7 Kriteria Rasio Pertumbuhan**

Persentase	Kemampuan Keuangan
Angka Persentase Positif	Sangat Baik
Angka Persentase Negatif	Sangat Buruk

Sumber : Halim (2007:241)

### C. METODE PENELITIAN

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Enrekang. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang sedangkan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode penarikan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan kriteria khusus terhadap sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2018 - 2020.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan beberapa analisis kinerja keuangan.

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

#### 2. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli guna membiayai pembangunan daerah. derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan

pemerintah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan dalam memperoleh pendapatan asli daerah dikategorikan efektif apabila rasio ini minimal mencapai 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

#### 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatanyang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan rasio efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Blanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

#### 6) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007: 241) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari suatu periode ke periode lainnya. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan tahun } (t-1)}$$

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012:178) rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi apabila rasio kemandirian mencapai 75-100%. Hasil penelitian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2018-2020 berdasarkan tingkat kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial terhadap masyarakat sebesar 7,62% berada dalam kriteria yang rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Nilai 7,62% berada dibawah rata-rata rasio kemandirian provinsi sulawesi selatan yaitu sebesar 14,71% hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah kurang baik.

### **2. Derajat Desentralisasi**

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Menurut Mahmudi (2016:140) "Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah." Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hasil penelitian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2018-2020 berdasarkan derajat desentralisasi fiskal yaitu sebesar 6,83% berada dalam kriteria yang sangat kurang. Nilai 6,83% berada dibawah rata-rata rasio derajat desentralisasi provinsi sulawesi selatan yaitu sebesar 11,50% hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio desentralisasi adalah kurang baik.

### **3. Rasio ketergantungan Keuangan daerah**

Rasio Ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar

tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Hasil penelitian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2018-2020 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 89,65% berada dalam kriteria yang tinggi. Artinya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan provinsi Nilai 89,65% berada diatas rata-rata rasio ketergantungan Keuangan daerah provinsi sulawesi selatan yaitu sebesar 79,45% hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio ketergantungan Keuangan daerah adalah kurang baik.

### **4. Rasio Efektifitas PAD**

Menurut Mahmudi (2010:143) rasio efektifitas PAD dikategorikan efektif apabila pemungutan sumber pendapatan daerah lebih dari 100% terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2018-2020 berada dalam kriteria tidak efektif, dimana sumber pendapatan daerah mencapai rata-rata 57% . Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun anggaran pemungutan Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori tidak efektif, karena anggaran PAD lebih besar dibandingkan realisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kata lain kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dinilai masih sangat kurang. Nilai 57% berada dibawah rata-rata rasio efektifitas PAD provinsi sulawesi selatan yaitu sebesar 97,06% hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio efektifitas PAD adalah kurang baik.

### **5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan rasio dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui

apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Rata-rata hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2018-2020 termasuk dalam kategori efisien. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efisiensi di bawah 100% yaitu 99,36 dengan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat angka yang melebihi realisasi belanja, tetapi pada tahun 2020 realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten Enrekang lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Nilai 99,36% berada dibawah rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah provinsi sulawesi selatan yaitu sebesar 100,24% hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah adalah baik.

#### **6. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007:241) rasio pertumbuhan keuangan daerah dikatakan bertumbuh dengan baik apabila kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif atau meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan keuangan tahun anggaran 2018-2020 sebesar 3,26% hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik, dimana dalam perhitungan rasio pertumbuhan semua rasio yang mengalami kenaikan dan bernilai positif. Nilai 3,26% berada diatas rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah provinsi sulawesi selatan yaitu sebesar 1,14% hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah baik. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan terhadap dana ekstern masih sangat tinggi, daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah juga harus mampu meningkatkan komponen pertumbuhan keuangan daerah agar dapat meningkat atau bernilai positif.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data,

pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi hasil mengenai analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah kabupaten enrekang dengan menggunakan rasio keuangan, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 – 2020. Rata-rata persentase berada pada kriteria rendah sekali yang berada pada rasio kemandirian 0% - 25% yaitu 7,9% dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah kurang baik.
2. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 - 2020 berada pada kriteria sangat kurang yang berada pada rasio Derajat Desentralisasi fiskal 0,00% - 10,00% yaitu 6,83% dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio desentralisasi adalah kurang baik
3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 – 2020. Rata-rata presentase berada pada kriteria Tinggi yang berada pada Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 87,6% - 100% yaitu 89,65% dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio ketergantungan Keuangan daerah adalah kurang baik.
4. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 – 2020. Rata-rata presentase berada pada kriteria Tidak Efektif yang berada pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) <75% yaitu 57% dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio efektivitas PAD adalah kurang baik.
5. Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui Rasio Efisiensi Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 – 2020. Rata-rata presentase berada pada kriteria Efisien yang berada pada Rasio Efisiensi <100% yaitu 99,36% dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Enrekang dilihat berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah adalah baik.

6. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Rasio pertumbuhan Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 – 2020. Rata-rata presentase berada pada kriteria sangat baik yang berada pada angka presentase positif yang artinya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilihat berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah baik.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini akan diberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi badan pengelola keuangan daerah (BPKD) kabupaten Enrekang dalam mengelola keuangan daerahnya dimasa yang akan datang. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Enrekang harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana ekstern dapat diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga diharapkan meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih rinci lagi dalam menganalisa laporan keuangan daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

Assidiqi, Bahrn. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Untuk Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi, (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor*

*Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Mahsun, Mohammad, (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA--

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pres.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Rofiuddin, Mohammad. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005-2009*. Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wulandari, Arnita. (2001). *Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 5(2), 17-33. <http://dx.doi.org/10.31258/je.27.2.p.146-159>

Yuliana. (2013). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Ditinjau Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.